



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT

Jalan H.M. Rafi'i No. 16 PANGKALAN BUN (74112) KALIMANTAN TENGAH
☎ Telp. (0532) 24475-24476 ☎ Fax. (0532) 24475 ✉ Email : itkab_kobar@yahoo.c.id

07 September 2023

Nomor : 7001.2/44/V/LHM/ITKAB/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Asistensi Pembangunan
Desa Antikorupsi pada Desa Lada
Mandala Jaya Tahun 2023

Yth. Kepala Desa Lada Mandala Jaya

di-

Desa Lada Mandala Jaya

Memperhatikan program desa antikorupsi yang merupakan program unggulan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi pada lingkup pemerintahan desa, dengan berpedoman buku desa antikorupsi yang berisi 5 (lima) komponen dan 18 (delapan belas) indikator pemenuhan yang menjadi prasyarat bagi desa untuk dikategorikan menjadi desa antikorupsi oleh KPK RI, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan asistensi pembentukan Desa Antikorupsi pada Desa Lada Mandala Jaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tujuan asistensi pembentukan desa antikorupsi ini adalah untuk :

1. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemenuhan indikator serta sekaligus bahan evaluasi pemerintahan desa menuju terbentuknya desa antikorupsi;
2. Mensinergikan dan mendukung program kegiatan pembentukan desa antikorupsi;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, berwibawa, transparan, tidak diskriminasi, akuntabel dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dengan dukungan seluruh elemen masyarakatnya.

Untuk memenuhi indikator desa antikorupsi pada Desa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai surat tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 701.4/95/STP/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 telah dilakukan asistensi pembangunan desa antikorupsi pada Desa Lada Mandala Jaya Kecamatan Pangkalan Lada Kab.Kotawaringin Barat, dengan hasil sebagai berikut:

1. Nilai komponen pembangunan desa anti korupsi pada Desa Lada Mandala Jaya Kecamatan Pangkalan Lada adalah **12,83** dengan nilai masing-masing komponen sebagai berikut (rincian hasil self assesment terlampir) :

NO	KOMPONEN	NILAI MAKSIMAL	HASIL SELFASSESSMENT
A	Penguatan Tata Laksana	25	1,44
B	Penguatan Pengawasan	15	0
C	Pelayanan Publik	25	8,89
D	Penguatan Partisipasi	20	2,5
E	Kearifan Lokal	15	0
	JUMLAH	100	12,83

2. Hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan desa antikorupsi pada Desa Lada Mandala Jaya Kecamatan Pangkalan Lada untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

A. Penguatan Tata Laksana

Terkait kebijakan Desa Lada Mandala Jaya belum memiliki SOTK Organisasi, Peraturan dan SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa, tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan, dan tentang Pakta Integritas.

Pemerintah Desa Lada Mandala Jaya telah memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh warga masyarakat www.ladamandalajaya.dessa.id, namun belum digunakan secara optimal sebagai wadah penyampaian informasi, hal ini diketahui karena dokumen RPJMDesa, RKPDesa, dan APBdesa belum diunggah diwebsite yang tersedia.

B. Penguatan Pengawasan

Desa Lada Mandala Jaya diketahui :

- belum melaksanakan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruh perangkat desa dan aparatur desa;
- belum adanya Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah.

C. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Pada penilaian penguatan kualitas pelayanan publik diketahui bahwa :

- belum tersedianya Layanan Pengaduan bagi Masyarakat;
- belum dilakukannya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa;
- belum adanya Maklumat Pelayanan yang disusun dan dipublikasikan.

D. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Pada penilaian area penguatan partisipasi masyarakat terdapat kelemahan dalam :

- belum adanya bukti Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan;
- belum adanya bukti Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

E. Kearifan Lokal

Pada penilaian area kearifan lokal terdapat kelemahan antara lain :

- belum adanya Budaya Lokal/Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- belum adanya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

3. Saran

Berdasarkan hasil penilaian, maka disarankan kepada Kepala Desa Mandala Jaya untuk melakukan perbaikan disetiap area penilaian, yaitu sebagai berikut:

A. Penguatan tata laksana

Menyusun SOTK dan kebijakan berupa Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang :

- 1) Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa;
- 2) Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan; dan
- 3) Pakta Integritas.

Untuk selanjutnya kebijakan yang telah disusun dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan diunggah pada website dan sosial media.

B. Penilaian Penguatan Pengawasan

- a. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja pada perangkat desa dan aparatur desa;
- b. menyelesaikan tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan pemerintah pusat/daerah yang dibuktikan dengan adanya dokumen :
 - 1) Surat keterangan/penjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang belum bisa diselesaikan dalam tahun berjalan dan dilampirkan bukti dukung yang diperoleh dari pemerintah pusat/daerah;
 - 2) Surat Penyelesaian/Berita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah Pemeriksaan Temuan dengan melampirkan bukti dukung.

C. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) membentuk tim dan menyusun sistem layanan pengaduan bagi masyarakat;
- 2) melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa secara berkala;
- 3) menyusun dan mempublikasikan maklumat pelayanan dan ditandatangani oleh Kepala Desa.

D. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Pada area ini disarankan agar :

- 1) Meningkatkan adanya Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan dengan melakukan Survei Perilaku baik konvensional maupun digital, menyusun Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan, Deklarasi COI yang sudah diisi oleh aparatur desa (pemberitaan diseminasi informasi mengenai deklarasi COI);
- 2) Meningkatkan peran Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

E. Penguatan kearifan lokal

Disarankan agar :

- 1) Meningkatkan peran Kesenian, adat istiadat dan/atau motto/slogan/jargon dan/atau Upaya perangkat desa beserta elemen masyarakat mensosialisasikan pencegahan korupsi dengan memadukan kearifan lokal setempat yang dilengkapi narasi dari 9 nilai antikorupsi dan diupload di website dan media sosial (baik video maupun artikel);
- 2) Menetapkan SK/ Deklarasi SK Penetapan/deklarasi/surat pernyataan tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang mendukung upaya pencegahan korupsi.

Demikian laporan asistensi pembangunan desa antikorupsi pada Desa Lada Mandala Jaya Kecamatan Pangkalan Lada, kami menghargai upaya kepala desa dan perangkat desa beserta seluruh masyarakat Desa Lada Mandala Jaya dalam melaksanakan pemenuhan pembangunan program desa antikorupsi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pembangunan desa antikorupsi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

INSPEKTUR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



ISNO PANDOWO, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19720616 199903 1 009

LAMPIRAN LAPORAN ASISTENSI PEMBANGUNAN DESA ANTIKORUPSI PADA DESA LADA MANDALA JAYA TAHUN 2023
 NO. 7001.2/44/V/LHM/TKAB/2023 TANGGAL 07 SEPTEMBER 2023
 OBSERVASI : LEMBAR SELF ASSESSMENT
 DESA LADA MANDALA JAYA KEC. PANGKALAN LADA

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BUKTI / EVIDENCE	BOBOT	JAWABAN			Jenis Dokumen		%	NILAI
					ADA	TIDAK	KONV & DIGITAL	DIGITAL	FISIK		
I	Penguatan Tata Laksana	I.1 Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. (2 tahun terakhir)	RPJMDes	5	v				v	19%	0,5
			RKPDDes		v				v		0,5
			APBDDes		v				v		0,5
			APBDDes perubahan		v				v		0,5
			Laporan Pertanggungjawaban		v				v		0,5
			Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa			v					0
			Notulensi Penyusunan regulasi			v					0
			Daftar Hadir Penyusunan regulasi			v					0
			Dokumentasi Penyusunan regulasi			v					0
			Undangan Sosialisasi regulasi ke Masyarakat			v					0
			Daftar hadir Sosialisasi regulasi			v					0
			Notulensi Sosialisasi regulasi			v					0
			Dokumentasi Sosialisasi regulasi			v					0
			Kesesuaian antara APBDes dengan Permendes terkait prioritas penggunaan dana desa			v					0
			Pertanggungjawaban Bumdes (pp 11 Tahun 2021)/ open slot		v				v		0,5
		I.2 Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	Digitalisasi seluruh dokumen (website/sosial media)	5						0%	0
			SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur			v					0
			Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa			v					0
			Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa			v					0
			Notulensi Penyusunan regulasi			v					0
			Daftar Hadir Penyusunan regulasi			v					0
			Dokumentasi Penyusunan regulasi			v					0
			Digitalisasi seluruh dokumen (website/sosial media)			v					0
			Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)			v					0
			Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan			v					0
			Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa			v					0
			Notulensi Penyusunan regulasi			v					0
			Daftar Hadir Penyusunan regulasi			v					0
			Dokumentasi Penyusunan regulasi			v					0
			Kesesuaian Perkades dengan notulensi			v					0
		I.3 Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan	Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan	5						0%	0
			Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa			v					0
			Notulensi Penyusunan regulasi			v					0
			Daftar Hadir Penyusunan regulasi			v					0
			Dokumentasi Penyusunan regulasi			v					0
			Kesesuaian Perkades dengan notulensi			v					0
			Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan			v					0
			Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa			v					0
			Notulensi Penyusunan regulasi			v					0
			Daftar Hadir Penyusunan regulasi			v					0
			Dokumentasi Penyusunan regulasi			v					0
			Kesesuaian Perkades dengan notulensi			v					0
			Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan			v					0
			Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa			v					0
			Notulensi Penyusunan regulasi			v					0

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BUKTI / EVIDENCE	BOBOT	JAWABAN			Jenis Dokumen			%	NILAI
					ADA	TIDAK	KOMV & DIGITAL	DIGITAL	FISIK	NILAI		
II	Penguatan Pengawasan	II.1 Adanya Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruhperangkat Desa dan Aparatur desa	5		v				0	0%	0
			Notulensi kegiatan			v				0		
			Daftar hadir			v				0		
			Dokumentasi			v				0		
			Digitalisasi seluruh dokumen (website/ sosial media)			v				0		
		II.2 Adanya Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah	Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)	5		v				0	0%	0
			Surat keterangan/penjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang belum bisa diselesaikan dalam tahun berjalan dan dilampirkan bukti dukung yang diperoleh dari pemerintah pusat/daerah			v				0		
			Surat Penyelesaian/Berita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah Pemeriksaan Temuan dengan melampirkan bukti dukung			v				0		
			Dokumen Tindakanlanjut/penyelesaian adalah berdasarkan Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang terkini			v				0		
			Surat pernyataan oleh kepala desa bersama Inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten			v				0		
	II.3 Tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi	Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab	5		v				0	0%	0	
		Screenshot berita media bahwa tidak ada kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut.			v				0			
		Surat pernyataan diupload ke website desa			v				0			
					v				0			

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BUKTI / EVIDENCE	BOBOT	JAWABAN				Jenis Dokumen		%	NILAI
					ADA	TIDAK	KONV & DIGITAL	DIGITAL	FISIK	NILAI		
III	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	III.1	Adanya Layanan Pengaduan bagi Masyarakat	5		V				0	0%	0
			Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa Email, Website, media sosial dan konvensional)			V				0		
			Sosialisasi dan publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan			V				0		
			Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan			V				0		
			Rekap progres pengaduan dan tindak lanjut			V				0		
		III.2	Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat	5		V				0	0%	0
			Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 2017 yang berlaku).			V				0		
		III.3	Informasi SPM sesuai dengan PermenPAN RB No. 2 tahun 2017	5	V		V			1	100%	5
			Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website)		V		V			1		
		III.4	Baliho/Poster APBDES yang mencakup: a. Sumber pendapatan (DD, ADD, Pajak Retribusi, PAD, Hibah, Transfer dari APBD provinsi, kabupaten dan kota dll) b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai Permentdes PDDT No. 8 Tahun 2022 c. Alokasi belanja tiap bidang kewenangan d. Kontak aduan (konvensional dan digital) Lokasi pemasangan: a. Kantor Desa (baliho) b. Dusun (poster atau baliho) c. Website d. Media sosial e. lainnya	5	V		V			1	78%	3,8888889
					V		V			1		
					V		V			1		
					V		V			1		
					V		V			1		
					V		V			1		
					V		V			1		
					V		V			1		
					V		V			1		
					V		V			1		
		III.5	Adanya Maklumat Pelayanan	5		V				0	0%	0
			Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku			V				0		
			Isi Maklumat pelayanan memuat minimal: a. Komitmen dari Aparat Desa b. Konsekuensi hukum c. Ditandatangani oleh Kepala Desa Maklumat Pelayanan Ditetapkan dengan minimal ukuran poster Lokasi Pemasangan: a. Di tempat pelayanan kantor desa dan dusun b. Di upload di Website dan media sosial			V				0		
						V				0		
						V				0		

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BUKTI / EVIDENCE	BOBOT	JAWABAN				Jenis Dokumen		%	NILAI
					ADA	TIDAK	KONV & DIGITAL	DIGITAL	FISIK	NILAI		
IV	Penguatan Partisipasi Masyarakat	IV.1 Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa	1. Musyawarah Dusun: a. Undangan kepada seluruh masyarakat dusun b. Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat dusun, daftar usulan yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat dusun) c. Daftar hadir d. Dokumentasi	5	v				v	0,5	50%	2,5
			2. Musyawarah desa: a. Undangan kepada masyarakat desa b. Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat desa, daftar usulan dan biaya yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat desa) c. Daftar hadir d. Dokumentasi		v				v	0,5		
			SK Tim Penyusun RKPDes (Permendes No. 21 Tahun 2020)		v				v	0,5		
			1. Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal: a. Perilaku masyarakat desa memberikan gratifikasi dan suap b. Mengetahui, menyadari dan menghindari adanya konflik kepentingan c. Mengetahui, memahami dan mengimplementasikan 9 nilai antikorupsi		v				v	0		
			2. Hasil rekapitulasi, analisis dan tindak lanjut		v				v	0		
			3. Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan		v				v	0		
			4. Sosialisasi PerKades secara fisik kepada masyarakat: a. undangan b. daftar hadir c. notulensi		v				v	0		
			d. dokumentasi		v				v	0		
			e. digitalisasi melalui video (sosialisasi/testimoni dari penerima pelayanan)		v				v	0		
			5. Deklarasi COI yang sudah diisi oleh aparat desa (pemberitaan diseminasi informasi mengenai deklarasi COI)		v				v	0		
		IV.3 Adanya Keterlibatan Lembaga Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa	Undangan kepada seluruh masyarakat dusun/desa Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat dusun, tandatangan oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat dusun/desa) Daftar hadir Digitalisasi seluruh dokumen dan kegiatan (website/sosial media) LPIDes	10	v				v	0	0%	0
					v				v	0		
					v				v	0		
					v				v	0		
					v				v	0		

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BUKTI / EVIDENCE	BOBOT	JAWABAN			Jenis Dokumen			%	NILAI	
					ADA	TIDAK	KORV & DIGITAL	DIGITAL	FISIK	NILAI			
V	Kearifan Lokal	V.1	Adanya Budaya Lokal/Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	5		V					0	0%	0
									0				
		V.2	Adanya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak			V				0			

No	KOMPONEN	NILAI MAKS	Hasil Self Assessment
1	PENGUATAN TATA LAKSANA	25	1.44250505
2	PENGUATAN PENGAWASAN	15	0
3	PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	25	8.88888889
4	PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT	20	2.5
5	KEARIFAN LOKAL	15	0
		100	12.83143939